



TRIBUN PONTIANAK/SAHIRUL HAKIM

PIDATO PENGANTAR - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, saat menyampaikan pidato pengantar bupati Kapuas Hulu terhadap pembahasan Raperda, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu, 25 Juni 2025.

SILPA APBD 2024 Kapuas Hulu Capai Rp 15 Miliar

KAPUAS HULU, TRIBUN - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sukardi, menyampaikan penyerapan APBD Kapuas Hulu tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan berhasil meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Memang yang tidak terealisasi dengan baik, menjadi SILPA, kalau tidak salah SILPA APBD Kapuas Hulu tahun 2024 kurang lebih Rp 15 miliar," ujarnya, usai menyampaikan pidato pengantar bupati Kapuas Hulu terhadap pembahasan Raperda, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, di Gedung DPRD Kapu-

as Hulu, Rabu 25 Juni 2025.

Selain itu juga jelas Wabup, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam laporan keuangan tahun anggaran 2024, tetap kembali bisa mempertahankan opini WTP dari BPK RI.

"Artinya laporan keuangan Pemda Kapuas Hulu tahun anggaran 2024, sudah diperiksa BPK RI Perwakilan Kalbar, dan berhasil mendapatkan opini WTP," ucapnya.

Sukardi menyatakan, opini WTP tersebut dapat tercapai, karena dukungan dari semua pihak, baik Eksekutif maupun Legislatif. "Ini berkat kerjasama yang baik semua pihak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Yanto, menjelaskan terkait penyampaian pertanggungjawaban APBD, merupakan keharusan bagi Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Legislatif.

"Pastinya merupakan ketentuan undang-undang, dan itu disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir," ujarnya.

Hasil rapat paripurna kali ini, selanjutnya kata Yanto, tentunya ada tahapan yaitu akan dibahas lagi lewat rapat-rapat paripurna lainnya. "Untuk sekarang ini kami di legislatif masih sifatnya mendengar saja," ungkapnya. (rul)